

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendidikan inklusif mungkin belum terlalu akrab terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Meski demikian, pada hakikatnya makna pendidikan adalah menjadikan kehidupan manusia bermartabat. Beragam problematika yang bermunculan dalam dunia pendidikan memang terkesan tidak akan pernah usai. Karenanya, pendidikan harus selalu *survive* dengan situasi dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman.

Seyogyanya negara memiliki kesadaran penuh akan kewajibannya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*).<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi segala keberagaman/perbedaan, baik perbedaan agama, etnis, status sosial, jenis kelamin, serta kemampuan fisik dan mental yang dimiliki oleh siswa. Tujuannya adalah agar tidak menghambat para siswa dalam belajar menghormati realita kehidupan dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Difabel adalah pengindonesiaan dari kata *difable* yang merupakan kependekan dari *differently able* (mampu secara berbeda). Sementara difabilitas berasal dari kata *difability* yang merupakan singkatan dari *diferent ability* (kemampuan berbeda). Kata ini untuk digunakan oleh para aktivis anti diskriminasi terhadap kaum “cacat” untuk menolak penggunaan kata *disable* (tidak memiliki kemampuan) atau *disability* (ketidakmampuan). Lebih lengkapnya, lihat artikel Asyhabuddin, “Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto,” *INSANIA*, Volume 13, Nomor 3, (September-Desember, 2008), 9.

<sup>2</sup> *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Surabaya: Apollo Lestari, t.t.), 22.

Sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu terobosan baru dalam dunia pendidikan yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk menempuh program pendidikan di sekolah. Selain itu, pendidikan inklusif juga merupakan suatu upaya pemerintah guna menanggapi problem yang terjadi mengenai perbedaan hak-hak individual dalam memperoleh pendidikan, yakni layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus.

Jeanne Ellis Ormroad dalam bukunya Psikologi Pendidikan mendeskripsikan keadaan siswa berkebutuhan khusus (*students with special needs*) bahwa

Siswa berkebutuhan khusus (*students with special needs*), yakni siswa yang sangat berbeda dari teman sebayanya dan membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini merupakan perbedaan individual (*individual differences*), yaitu variasi kemampuan dan karakteristik (inteligensi, kepribadian, dan sebagainya) di antara para siswa pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok.<sup>3</sup>

Keadaan siswa berkebutuhan khusus yang telah dideskripsikan oleh J. E. Ormroad di atas menggambarkan bahwa siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik secara individual dari pada teman-teman sebayanya, sehingga dibutuhkan sistem pembelajaran yang berbeda dalam menyampaikan materi pelajaran.

Pada awalnya, seluruh anak berkebutuhan khusus (ABK)<sup>4</sup> mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, kini telah banyak sekolah

---

<sup>3</sup> Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi Pendidikan; Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, Jilid 1, Terj. Erlangga, Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 2008), 207.

<sup>4</sup> Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah kata serupa yang lebih halus dari anak berkelainan atau anak luar biasa. Menurut Efendi, anak berkelainan atau anak luar biasa adalah anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga untuk pengembangan potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai dengan

reguler yang merubah wajahnya menjadi sekolah inklusif. Perubahan ini bermula dari ketidakpuasan para pemerhati pendidikan terhadap sistem segregasi pendidikan yang kurang mampu memberikan pelayanannya secara optimal dan menunjukkan posisi para siswa berkebutuhan khusus semakin termarginalkan dalam dunia pendidikan formal. Oleh karena itu, perubahan paradigma pendidikan yang mengesampingkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersendiri dan terpisah dari anak-anak normal menuju pada penyatuan antara keduanya dinilai sangat diperlukan. Solusinya, program sekolah inklusif adalah angin segar di dunia pendidikan Indonesia yang baru-baru ini telah banyak diaplikasikan.

Di samping sebagai solusi dari pemerintah, penyelenggaraan program sekolah inklusif juga merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan menurunkan angka kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Konkretnya, permasalahan yang sering muncul dalam diri para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah perasaan minder dan gengsi pada masyarakat sekitar. Begitu pula dengan para ABK yang kurang memiliki *self confidence* (kepercayaan diri), bahkan cenderung merasa rendah diri.

Oleh sebab itu, diharapkan program sekolah inklusif ini mampu membangkitkan *self confidence* (kepercayaan diri) serta memberikan motivasi bagi para anak berkebutuhan khusus dan orang tua mereka. Selain itu, anak-anak berkebutuhan khusus juga dapat mengekspos potensi diri mereka secara

---

karakteristiknya. Berdasarkan klasifikasinya, antara lain: 1) Kelainan aspek fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa; 2) Kelainan aspek mental, yakni tunagrahita; dan 3) Kelainan sosial emosi, yakni tunalaras. Lihat Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 26.

optimal dan mereka dapat membiasakan diri untuk bersosialisasi dengan lingkungannya secara baik.

Lebih lanjut, keberadaan sekolah inklusif juga diharapkan mampu menjadikan para siswa reguler (anak-anak normal) untuk dapat lebih bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan keberuntungannya, terutama nikmat kesehatan dan kesempurnaan fisik yang telah dianugerahkan kepada mereka. Selain itu, diharapkan para siswa reguler mampu membangun rasa solidaritas dan toleransi terhadap teman lainnya, terutama untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada siswa program inklusif agar tercipta persaudaraan yang erat antar sesama.

Takdir Ilahi mengutip O'Neil dalam bukunya Pendidikan Inklusif tentang pengertian dari pendidikan inklusif, yakni “sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat dan di kelas reguler bersama-sama teman-teman (anak-anak normal) seusiaanya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.”<sup>5</sup>

Di Indonesia, pendidikan inklusif sudah mulai dirintis sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung ke sekolah umum. Lambat laun, sikap masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata anak yang mengalami kecacatan. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian akan pentingnya sekolah terintegrasi dengan mengundang Helen Keller International, Inc.

---

<sup>5</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 27.

Dengan berhasilnya proyek tersebut, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Pada tahun 1990-an upaya baru dalam pengembangan pendidikan inklusif dilakukan melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB.

Lalu, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi melakukan uji coba di 9 propinsi yang memiliki 1.500 siswa ABK telah bersekolah di sekolah reguler. Kemudian, pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa ABK dan pada tahun 2007 sejumlah 15.181 ABK tersebar pada 796 sekolah inklusif. Berikutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa yang di dalamnya menegaskan bahwa setiap pemerintah kabupaten/kota untuk menunjuk paling sedikit 1 SD dan 1 SMP pada setiap kecamatan serta 1 SMA untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan harapan dapat meningkatkan penyelenggaraan sekolah inklusif secara signifikan dan tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus lainnya yang masih termarginalkan.<sup>6</sup>

Selain undang-undang yang ada di Indonesia sebagai payung hukum berdirinya sekolah inklusif, salah satunya adalah organisasi internasional UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) yang mana pada tahun 1994 telah merumuskan hukum terkait pendidikan inklusif bahwa

Sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya.

---

<sup>6</sup> Sunaryo, Makalah "Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)," Jurusan PLB FIP UPI, (Pebruari, 2009), 8-9.

Hal ini harus mencakup anak cacat dan berbakat, anak jalanan dan anak yang bekerja, anak dari populasi terpencil atau nomaden, anak dari linguistik, minoritas etnis atau budaya dan anak-anak kurang beruntung dari lainnya atau marginal atau kelompok.<sup>7</sup>

Berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di seluruh dunia telah menjadi payung hukum bagi pendidikan inklusif. Menyoroti realita pendidikan inklusif di Indonesia dengan merujuk pada kebijakan pemerintah dan data-data tahunan perkembangan sekolah inklusif yang ada di Indonesia dapat ditangkap sebuah pemikiran bahwa penyebaran sekolah inklusif belum merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah reguler yang belum memiliki berbagai kesiapan untuk menyelenggarakan sistem layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Walaupun demikian, seiring berjalannya waktu diharapkan jumlah sekolah inklusif dapat berkembang secara signifikan. Paling tidak, terdapat 1 SD/MI Inklusif, 1 SMP/MTs Inklusif, 1 SMA/MA Inklusif, dan 1 SMK/MAK Inklusif yang ada di setiap wilayah kabupaten, bahkan kecamatan.

Menurut peneliti, sekolah inklusif termasuk kategori sekolah yang unik, sebab sekolah ini merupakan sekolah reguler yang notabene hanya diperuntukkan bagi anak-anak normal saja, namun sekolah tersebut mampu menyelenggarakan program pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang seharusnya mereka mengenyam pendidikan hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB) saja. Inilah prinsip persamaan hak pelayanan pendidikan bagi seluruh warga negara yang diaplikasikan dalam program sekolah inklusif.

---

<sup>7</sup> Yachya Hasyim, "Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang," *Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, (Juli, 2013), 114.

Salah satu sekolah yang telah mengaplikasikannya adalah SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur yang dirintis sejak tahun 2010. Program sekolah inklusif ini dimantapkan dengan visi dari SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur, yakni “Dengan lingkungan yang kondusif dan berkepribadian, terwujudlah siswa yang berilmu, berakhlak mulia dan berprestasi berdasarkan IMTAQ dan IPTEK serta menjadi pelopor peduli pendidikan inklusi.”<sup>8</sup>

Dalam tataran praktiknya, sekolah inklusif harus memiliki relasi dan kerja sama yang baik antara guru pembimbing khusus (GPK)/guru *shadow*, lembaga sekolah luar biasa setempat, para wali murid, psikiater, pemerintah daerah setempat dan pusat, serta anggota masyarakat lainnya guna tercapainya pembelajaran dengan *setting* inklusif yang kondusif. Sekolah ini menggunakan model kelas reguler dengan *pull out*<sup>9</sup> yang mana di dalamnya bukan hanya terdiri dari para siswa normal saja, namun juga terdapat beberapa siswa berkebutuhan khusus dengan beragam kategori.

Selanjutnya, hal yang menjadi pertanyaan inti adalah bagaimana para guru di sekolah tersebut mampu mendesain sedemikian rupa sistem pembelajarannya?. Tentu tujuannya ialah mampu mengantarkan peserta didik, baik siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus mencapai tujuan pembelajaran secara tuntas dan kompetensi yang telah ditentukan.

---

<sup>8</sup> “Visi, Misi dan Tujuan SDN Lemahputro 1 Sidoarjo”, *SDN Lemahputro 1 Sidoarjo*, <http://www.Visi, Misi dan Tujuan SDN Lemahputro 1 Sidoarjo ~ SDN Lemahputro 1 Sidoarjo.htm>, diakses tanggal 09 Maret 2015.

<sup>9</sup> Menurut Ashman dalam Emawati pada artikelnya yang berjudul Mengenal Lebih Jauh Sekolah Inklusi yang mana dikutip oleh Syafrida dan Aryani dalam artikelnya bahwa “Model kelas reguler dengan *pull out*, yakni ABK belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan GPK.” Lihat artikel Syafrida Elisa dan Aryani Tri Wrastari, “Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari Faktor Pembentukan Sikap,” *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 01, (Februari, 2013), 3.

Perlu diketahui bahwasanya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu jembatan menuju perbaikan budi pekerti generasi bangsa yang kini telah banyak mengalami degradasi/kemerosotan. Buktinya, melihat tidak sedikit kasus yang menimpa anak-anak di bawah umur, seperti depresi, trauma psikologis, bunuh diri, bahkan penganiayaan dan penelantaran anak yang berujung pada kematian. Di antara penyebabnya adalah penghinaan serta perlakuan menyimpang lainnya dari orang-orang terdekat di sekitar lingkungan mereka, seperti keluarga, guru, atau teman.

Sekilas dari observasi pralapangan yang dilakukan peneliti di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan unik bagi peneliti. Di antaranya adalah berkaitan dengan esensi ajaran agama Islam tentang muamalah, yakni menggambarkan *hablum min an-naas* (hubungan antar manusia). Deskripsinya, siswa normal berteman akrab tanpa membedakan perlakuannya dengan para siswa yang berkebutuhan khusus. Begitu pula dalam kegiatan pembelajaran, guru bidang studi dengan didampingi oleh guru pembimbing khusus (GPK)/guru *shadow* berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal guna mengoptimalkan potensi diri siswa, baik pada siswa normal [program reguler] maupun siswa berkebutuhan khusus [program inklusif].

Dengan demikian, peneliti berupaya melakukan serangkaian penelitian kualitatif dengan mengambil sebuah judul, yakni **“Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam *Setting* Inklusif (Studi Kasus di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur).”**

## B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perekrutan *input* pada program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur?
2. Bagaimana klasifikasi tenaga pendidik pada program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur?
3. Bagaimana proses pembelajaran yang diterapkan pada program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur?
4. Bagaimana lingkungan pendidikan untuk siswa program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur?
5. Bagaimana *output* yang dihasilkan pada program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur?
6. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan/mengungkapkan dan mengeksplorasi (*to describe and explore*) sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diterapkan pada program inklusif di SD Negeri Lemahputro 1 Kota Sidoarjo Jawa Timur beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya sistem pembelajaran PAI pada program inklusif tersebut.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) kontribusi, yakni:

##### 1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya dalam *setting* program inklusif.

##### 2. Kontribusi Praktis

- a. Lembaga Sekolah Inklusif dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu tolak ukur dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI pada siswa program inklusif.
- b. Peneliti dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta dapat menambah khazanah keilmuannya.
- c. Masyarakat mampu menilai mutu pembelajaran PAI pada siswa program inklusif sehingga mereka akan lebih optimis dan antusias terhadap Sekolah Inklusif.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dalam bentuk tabel 1.1 tentang laporan penelitian terdahulu.

**Tabel 1.1: Penelitian terdahulu tentang pendidikan inklusif**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	<u>Yachya Hasvim</u> Pendidikan Inklusif di SMK	Ada beberapa hal penting terkait pelaksanaan pendidikan Inklusif di SMK,	Pelaksanaan sistem pendidikan	Pelaksanaan sistem pendidikan

	<p>Negeri 2 Malang</p> <p>(Artikel dalam Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, (Juli, 2013), 112-121).</p>	<p>antara lain:</p> <p>1) Sebuah proses dan tujuan yang menggambarkan kualitas dan karakteristik tertentu sebagai perwujudan pendidikan untuk semua;</p> <p>2) Sebuah upaya merespon keberagaman masyarakat;</p> <p>3) Sebuah alternatif yang mendekati sesuai untuk mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK);</p> <p>4) Pendidikan inklusif di SMK lebih mengakomodasi pengembangan <i>skill</i> (kecakapan) dan motorik peserta didik ABK agar lebih mudah melaksanakan praktek kerja lapangan dengan rasa aman, karena semua terintegrasi di lingkungan sekolah.</p>	<p>inklusif di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan orientasi keterampilan sebagai bekal hidup di lingkungan masyarakat.</p>	<p>inklusif pada mata pelajaran PAI dengan orientasi sebagai bekal bersosialisasi di lingkungan masyarakat.</p>
2	<p><b><u>Tarmansyah</u></b></p> <p>Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang</p> <p>(Artikel dalam Jurnal <i>PEDAGOGI</i></p>	<p>Penerapan sistem pendidikan inklusif ditujukan untuk pengembangan kebijakan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, kapasitas bangunan/lokal, dan keterlibatan masyarakat serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pengimplementasiannya, yakni kurangnya partisipasi</p>	<p>Sistem pembelajaran dalam <i>setting</i> inklusif beserta kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan proses pembelajaran.</p>	<p>Sistem pembelajaran fokus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam <i>setting</i> inklusif.</p>

	<i>Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan</i> , Volume IX, Nomor 1, (April, 2009), 1-2	orang tua, kurangnya pemahaman guru terhadap manajemen pembelajaran bagi anak program inklusif, serta pihak birokrasi sekolah belum sepenuhnya memperhatikan mekanisme jalannya pelaksanaan pendidikan inklusif.		
3	<b><u>Asyhabuddin</u></b> Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto  (Artikel dalam Jurnal INSANIA, Volume 13, Nomor 3, (September-Desember, 2008), 1-10).	Gerakan perjuangan anti diskriminasi dengan mengampanyekan dan mengaplikasikan konsep pendidikan inklusif di kampus-kampus, ada 3 level perubahan, yaitu: 1) Perubahan sikap, berupaya menerima keragaman orang lain; 2)Perubahan kurikulum, modifikasi kurikulum untuk program inklusif; 3) Perubahan lingkungan, berupaya memfasilitasi orang-orang berkebutuhan khusus.	Deskripsi mengenai hal-hal yang terkait dengan difabilitas dan kaitannya dalam dunia pendidikan Islam, khususnya rencana pada jenjang Perguruan Tinggi (PT).	Ide pendidikan inklusif sebagai solusi bagi diskriminasi kaum difabel di dunia pendidikan Islam pada anak di jenjang Sekolah Dasar (SD).

Menurut peneliti, riset ini perlu dilakukan bukan hanya untuk sekedar penelitian terbaru maupun untuk penyelesaian tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar magister, melainkan untuk melengkapi segmen penelitian terkait pendidikan inklusif. Adapun segmen dalam penelitian ini difokuskan pada sistem pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

## F. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara bertahap dengan mengikuti sistematika sebagaimana berikut.

### 1. Bagian Awal

Bagian permulaan ini berisi halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari enam bab yang meliputi:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, beberapa penelitian terdahulu dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka yang berisi uraian teori-teori mengenai sistem pembelajaran PAI dalam *setting* inklusif.

Bab III ialah metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian.

Bab IV yakni berisi paparan data di lokasi penelitian sekaligus temuan dari hasil penelitian tersebut.

Bab V memuat pembahasan yang merupakan sinergi antara hasil temuan dengan berlandaskan pada analisa teori-teori dalam kajian pustaka. Namun, penggunaan analisis dengan teori yang berbeda juga dimungkinkan agar hasil penelitian ini semakin matang dan memiliki sudut pandang yang lebih luas.

Bab VI yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, implikasi teoritis dan praktis, serta rekomendasi yang diperuntukkan pada pihak-pihak terkait.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian terakhir ini berisi tentang bibliografi/daftar pustaka, lampiran-lampiran terkait penelitian, nota konsultan, serta biografi penulis.